

**ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR
TENTANG KONSEP *HUDUD* DALAM PERSPEKTIF TEORI *MASLAHAH***

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Magister Ilmu Agama Islam**



Disusun oleh :

SONI ZAKARIA

NIM: 201320290211017

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2018**




TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SONI ZAKARIA

201320290211017



Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada hari/tanggal, Senin/ 5 Februari 2018
Dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Prof. Dr. Tobroni, M.Si.
Sekretaris	:	Dr. Moh. Nurhakim, M.Ag.
Penguji I	:	Dr. Abdul Haris. M.A.
Penguji II	:	Dr. Pradana Boy ZTF. M.A.

**ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR
TENTANG KONSEP HUDUD DALAM PERSPEKTIF
TEORI MASLAHAH**

Diajukan oleh :

SONI ZAKARIA
201320290211017

Telah disetujui
Pada Hari/Tanggal, **Senin 5 Februari 2018**

Pembimbing Utama


Prof. Tobroni, M.Si.

Dirtektur
Program Pascasarjana


Akhsanul In'am, Ph.d

Pembimbing Pendamping


Dr. Moh. Nurhakim, M.Ag.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam


Dr. Abdul Haris, M.A.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **SONI ZAKARIA**

NIM : **201320290211017**

Program Studi : **Magister Ilmu Agama Islam**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa;

1. TESIS dengan judul **ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG KONSEP HUDUD DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH** adalah karya Saya dan dalam naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, Saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN**, dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 Februari 2019.

Yang Menyatakan;



SONI ZAKARIA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
ABSTRACT.....	4
PENDAHULUAN.....	5
KAJIAN TEORI.....	10
METODOLOGI.....	15
TEMUAN PENELITIAN.....	16
PEMBAHASAN.....	22
SIMPULAN.....	25
REFERENSI.....	27

ABSTRAK

Teori *Hudud* (*The Theory of Limits*) merupakan salah satu pokok pemikiran Muhammad Syahrur dalam kajian hukum Islam. Dengan munculnya teori baru yang dibangun Syahrur diharapkan bisa memberikan sebuah solusi yang dinamis untuk ruang gerak masyarakat muslim saat ini, pemikiran-pemikirannya sungguh berani, sebab dalam menganalisis teks - teks al-Qur'an Syahrur menggunakan pendekatan baru yaitu ademu *taraduf* (tidak ada sinonim) yang belum diaplikasikan sebelumnya dalam al-Qur'an yang merupakan aplikasi dari pendekatan linguistiknya.

Gagasan Syahrur mengenai hukum Islam dengan teori *hudud* yang ia bangun adalah salah satu metododologi yang bermaksud untuk mencapai kemaslahatan manusia secara umum. Maka dari itu focus penelitian di sini bermaksud menguji teori hudud Syahrur dilihat dari teori masalah, agar dapat menggali nilai-nilai dari substansi kemaslahatan yang ada di teori hudud Syahrur

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan model studi kepustakaan atau yang sering kita dengar dengan (*library research*). Karena kajian ditujukan untuk membongkar pemikiran Muhammad Syahrur, dan pemikiran Syahrur merupakan gagasan yang terkandung dalam naskah primer disebut sebagai gagasan primer, Maka peneliti menggunakan teknik analitis kritis. Tujuan penelitian analitis kritis adalah mengkaji gagasan primer mengenai suatu ruang lingkup permasalahan yang dipercaya oleh gagasan sekunder yang relevan.

Syahrur dalam membangun teori hududnya berawal dari kajian filologi atau bahasa sebagai pijakan awal penafsiran terhadap ayat-ayat hukum. Dengan demikian bisa ditemukan pemaknaan istilah-istilah kata kunci al-qur'an yang harus dipahami, yaitu *hudud*, *al-istiqamah*, dan *al-hanafiyah*. Syahrur menemukan teori hudud yang di dalamnya termuat enam teori dalam menganalisis ayat-ayat muhkamat yang terdapat pada al-Qur'an. Di sini peneliti menemukan teori hudud Syahrur dalam membangun teorinya berorientasikan kepada kemaslahatan.

Kata Kunci: Syahrur, Hudud, Masalah.

ABSTRACT

The Hudud Theory of Limits is one of the main ideas of Muhammad Syahrur in the study of Islamic law. With the emergence of a new theory built by Syahrur, it is hoped that it can provide a dynamic solution for the movement of Muslim society today, his thoughts are truly brave, because in analyzing the Qur'anic texts of Syahrur using a new approach, namely *adamu taraduf* (no synonyms)) which has not been applied before in the Qur'an which is an application of its linguistic approach.

Syahrur's idea of Islamic law with the theory of hudud that he built was one methodology that intended to achieve human benefit in general. Therefore, the focus of the research here intends to examine the hudud Syahrur theory seen from the *maslahah* theory, in order to be able to explore the values of the welfare substances that exist in the Syahrur hudud theory.

In this study researchers used a qualitative research approach, using a library study model or what we often hear (library research). Because the study is intended to dismantle Muhammad Syahrur's thoughts, and Syahrur thought is an idea contained in the primary text referred to as the primary idea, So researchers use critical analytical techniques. The aim of critical analytical research is to examine primary ideas about a scope of problems that are believed by relevant secondary ideas.

Syahrur in building his hudud theory began with the study of philology or language as the initial foundation for interpreting the legal verses. Thus it can be found the meaning of the terms of the quran keywords that must be understood, namely hudud, *al-istiqamah*, and *al-hanafiyyah*. Syahrur found the hudud theory which contained six theories in analyzing the verses of the *muhkamat* found in the Qur'an. Here researchers find the theory of hudud Syahrur in building his theory oriented to benefit.

Keyword: Syahrur, Hudud, Maslahah.

PENDAHULUAN

Teori *Hudud (The Theory of Limits)* merupakan salah satu pokok pemikiran Muhammad Syahrur dalam kajian hukum Islam. Teori ini lahir sebagai bentuk kegelisahan Syahrur dalam menghadapi fenomena masyarakat kontemporer yang bersifat maju terus bergerak dan dinamis akan tetapi masyarakat Islam dituntut harus sesuai dengan perkembangan arus modernisasi. Dengan munculnya teori baru yang dibangun Syahrur diharapkan bisa memberikan sebuah solusi yang dinamis untuk ruang gerak masyarakat muslim saat ini, akan tetapi tetap dalam bingkai aturan hukum yang telah ditetapkan dan ditentukan dalam al-Qur'an. (In'am Esha: 103).

Syahrur merupakan salah satu tokoh pembaharu dalam bidang hukum Islam kontemporer, karyanya terbaiknya adalah *al Kitab wa al Qur'an, Qiroah Muashirah* (1990) telah menimbulkan banyak kontroversi dalam percaturan pemikiran hukum Islam Kontemporer, akibat dari pemikiran-pemikirannya yang berani, sebab dalam menganalisis teks - teks al-Qur'an Syahrur menggunakan pendekatan baru yaitu *adamu taraduf* (tidak ada sinonim) yang belum diaplikasikan sebelumnya dalam al-Qur'an yang merupakan aplikasi dari pendekatan linguistiknya. (Syahrur: 2014).

Menurut pemikir yang terkenal liberal ini, Syahrur berpendapat bahwa perlu adanya sebuah terobosan dalam memahami Islam yang ada sekarang ini. *Pertama* pemahaman bahwa Islam itu *hanif* adalah sebuah keniscayaan. *Kedua* Syahrur mengandaikan bahwa jika kalau al-Qur'an diturunkan saat ini. *Ketiga* konstruksi Negara Islam itu harus direkonstruksi, dan *Keempat*, dibutuhkan adanya pengganti dari institusi tirani yang telah menyelimuti hampir seluruh Negara yang berasaskan Islam. (Muhyar Fanani, 2007).

Menurut Syahrur masyarakat saat ini telah terkotakan kedalam bentuk dua blok. *Pertama*, mereka yang berlandaskan secara kuat kepada arti literal dari tradisi. Mereka

mempunyai keyakinan bahwa warisan tersebut menyimpan kebenaran absolut. Sehingga apa yang cocok untuk semua orang-orang beriman di zaman apapun cocok juga kepada komunitas pertama dari orang-orang beriman di zaman Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan semacam inilah yang kemudian telah menjadi sesuatu yang final dan absolute.

Kedua, kelompok yang lebih semangat dalam menyerukan modernitas, dan sekulerisme sepakat untuk menolak semua bentuk warisan Islam termasuk al-Qur'an sebagai budi dari tradisi, yang kemudian akan hanya menjadi candu pada pendapat umum. Menurut mereka ritual adalah gambaran ketidakjelasan. Kelompok yang mengedepankan ini adalah kaum komunis, Marxis, dan beberapa kaum nasionalis Arab. (Syahrur, 2017).

Terlepas dari kelebihan dan kelemahan nya, Syahrur adalah *mufakir* muslim kontemporer yang progresif dan memiliki wawasan keIslaman yang luas dan komitmen yang tinggi. Secara tidak langsung ia telah membuka pemahaman baru dalam wacana pemikiran Islam. Tawaran epistemologisnya layak untuk diapresiasi terlepas dari kekurangan-kekurangannya yang menggambarkan dia seorang manusiawi. Seperti halnya diungkap Danial L. Pals: Menurutny melihatnya sesuatu dari dimensi baru, walaupun terdapat kesalahan adalah lebih penting dan lebih baik dari upaya menjelaskan sesuatu yang semua orang dengan mudah dapat mengkalim sebagai hal sesuatu yang biasa". (Danial, 1996).

Dialektika antara masyarakat dan hukum merupakan sebuah keniscayaan, artinya bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, sebaliknya hukum akan berpengaruh terhadap masyarakatnya. Dan perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, atau sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan

perubahan hukum. Seperti halnya adagium yang menyatakan bahwa hukum lahir karena adanya tuntutan kebutuhan dalam masyarakat.

Dengan demikian, konsekuensi logis dari perkembangan dinamika masyarakat dapat berpengaruh terhadap konspsepsi hukum, misalnya modernitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat secara tidak langsung mempengaruhi pandangan terhadap hukum Islam. Oleh karena itu modernitas telah membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk konsepsi hukum khususnya hukum Islam.

Probematika dan kasus-kasus hukum akan dan selalu berkembang sesuai paradigma masyarakat. Hukum Islam akan dapat memainkan perannya dengan baik dan sesuai dengan sifat karakteristiknya. (Djamil, 1997). Jika mampu mengikuti perkembangan hukum manusia yang selalu berubah dan berkembang, yang pada akhirnya memberikan jalan keluar terbaik dari berbagai persoalan hukum, dan dapat diterima oleh semua pihak serta tidak keluar dari kerangka ajaran Islam itu sendiri.

Dalam kehidupan sosial dewasa ini, hukum Islam selalu dituntut untuk terus merespon dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam dimensi ruang dan waktu. Permasalahan aktualisasi hukum Islam yang telah ada dan terdokumentasi dalam kitab-kitab fikih merupakan produk ilmu hukum Islam tradisional yang sama sekali belum mempertimbangkan perubahan-perubahan modern seperti *konstitusionalisme, demokrasi, civil society*.

Pembaharuan pemikiran hukum Islam pada masa modern ini umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologi baru. Paradigma yang digunakan cenderung menekankan wahyu dari segi konteksnya, metode ini tentu berbeda dengan metodologi klasik. Relasi antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya dipahami melalui interpretasi literal akan tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal yang termuat dalam teks-teks wahyu.

Walaupun tawaran metodologi hukum islam tersebut memiliki pendekatan yang berbeda-beda, namun pada intinya mereka memiliki kecendrungan *rasional-filosofis* atau dengan kata lain menggunakan paradigma nalar *burhani* (*rasio*) sebagai pijakan pemikiran mereka. Rasionalitas yang dibawa oleh ulama² fikih ingin melakukan penalaran yang sesuai dengan tuntutan Allah swt, yang pada akhirnya adalah tercapainya kemaslahatan manusia pada umumnya.

Oleh karena itu, gagasan Syahrur mengenai hukum Islam dengan teori *hudud* yang ia bangun adalah salah satu metododologi yang bermaksud untuk mencapai kemaslahatan manusia secara umum. Persoalan kajian hukum Islam saat ini masih menjadi topik hangat untuk dibicarakan, baik kaitanya dengan *state law*, maupun sebagai tema diskusi yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran dalam menggali makna ayat dalam al-Qur³an.

Sebagai contoh perbedaan dalam memahami ayat adalah masalah hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian. Banyak *Mufakir* muslim baik dari kalangan fundamental maupun modernis telah berusaha berijtihad, walaupun terkadang kedua golongan tersebut saling mengklaim ijtihadnya paling benar.

Salah satu para pemikir tersebut adalah Muhammad Syahrur ijtihadnya sangat bermanfaat dalam perkembangan wacana pembaharuan hukum. Dia yang merupakan cendekiawan Mesir-Syiria menawarkan gagasan berupa teori aplikatif dalam hukum Islam. Dalam karyanya yang monumental *al Kitab wa al Qur'an* terdapat sejumlah gagasan kontroversial di barat tengah pada tahun 2000 dan medapati temuan pemikiran kontemporeer yaitu *Nadzariyat al Hudud* yang diukir Syahrur dalam jangka waktu yang cukup panjang sekitar 20 tahun..

Hasil dari kajiannya merupakan warisan intelektual yang luar biasa, terutama bagi para mufasir agar kembali al-Qur⁴an dan Sunnah, untuk membangun hukum

sebagai sistem yang komprehensif dalam konteks yang lebih luas. Walaupun Syahrur secara pribadi mengatakan bahwa bukunya bukanlah buku tafsir atau hukum tapi sebuah “pembacaan kontemporer” terhadap al-Qur’an.

Berkaitan dengan persoalan hukum bagi tindak pidana pencurian Syahrur menawarkan gagasan teori *hudud*. Tujuan dari teori ini adalah mencari solusi alternatif terhadap penerapan hukum pidana Islam dan mencari kemaslahatan. *Al-Islam salih likulli zaman wa makan* menjadi titik sumber dalam pengembangan pemikiran Syahrur.

Syahrur memandang bahwa agama Islam merupakan agama yang fitrah dan hanafiyah yang senantiasa mengalami perubahan dengan melihat perubahan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat baik ekonomi maupun politiknya (Ridwan, 2008) Syahrur berpandangan *hudud* adalah hukum yang keras dan kejam. Maka dari itu *hudud* sebaiknya dibatasi dengan melihat jenis pelanggaran yang hukumannya disebutkan secara khusus dalam al-Qur’an, seperti halnya pencurian. Dalam memahami persoalan ini Syahrur menggunakan teori *hudud* maksimalnya.

Menurut Syahrur hukuman tindak pidana pencurian yang termaktub dalam surat al-Maidah ayat 38 berupa potong tangan merupakan batasan tertinggi. Maksudnya bahwa pencuri tidak boleh dihukum melebihi potong tangan. Bagi Syahrur kajian-kajian Islam sering melupakan dimensi universalnya, karena melihat konstruksi fikih yang selalu pada posisi kepada keberpihakan. Bahwa hanya sayalah yang paling benar. Formulasi fikih seperti ini menghalangi umat Islam sendiri dari prinsip dasar syariah yaitu keberadaan Muhammad sebagai Rasul untuk semua manusia, dan risalahnya mampu menjawab dan relevan di setiap zaman dan tempat. Dari paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti sanksi Syahrur dalam hukuman terhadap tindak pidana pencurian dan analisis fikih jinayah terhadap pemikiran Syahrur. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut, 1) Bagaimana konsep *hudud* yang dibangun oleh Muhammad Syahrur?. 2) Bagaimana konsep *hudud* Syahrur dalam perspektif teori *Maslahah*?

KAJIAN TEORI

Teori Maslahah.

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab, *maslahah* kata tunggal dari kata *al-mashalih*, sama dengan *al-shalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan (Ibnu Manzur, 1995) dan juga telah dibakukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan (Kholil, 1995). Menurut Ibn Manzur, *maslahah* berarti kebaikan dan ia merupakan bentuk *mufrod (singular)* dari perkataan *masalah (plural)* (Ibnu manzur, 1995). *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu merupakan suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu juga suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya mafaat lahir batin. (Hamid, 1971).

Para ulama² *ushul fikih* secara substantif memberikan pengertian *maslahah* sebagai suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) dan menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif atau (*mudharat*). (Dahlan, 2010).

Pembagian Masalahah

Imam al-Ghazali membagi masalahah menjadi tiga bagian : *masalahah mu'tabarah, masalahah mulghoh, masalahah mursalah.*

1. Masalahah Mu'tabarah.

Maslahah mu'tabarah adalah masalahah yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah rasulullah saw. Artinya, ada petunjuk pada adanya masalahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Masalahah ini terbagi menjadi dua. (Syarifudin, 1999).

2. Munasib Mu'atsir.

Munasib Mu'atsir adalah petunjuk langsung dari pembuat hukum, artinya ada petunjuk nash atau ijmak yang menetapkan bahwa masalahah ini dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada maslahat. Umpamanya tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut maslahat, karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya penyakit itu dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan yang ditegaskan dalam surah al-Baqarah, ayat 222.

3. Munasib Mu'alaim.

Munasib Mu'alaim, adalah tidak ada petunjuk langsung oleh syara' baik dalam bentuk nash atau ijmak terhadap masalahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Misalnya, berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya, dengan alasan anak gadisnya itu belum dewasa. Belum dewasa ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

4. Masalah Mulghoh.

Maslahah Mulghoh adalah masalah yang nilainya kecil dan lemah bahkan bertentangan dengan masalah yang lebih utama dan dimungkinkan bisa bertentangan lagi dengan nash. Dengan kata lain *maslahah mulghoh* ini adalah masalah yang bertentangan dengan dalil syara' (Manan, 2006). Seperti halnya maslahat zina. Kenikmatan yang didapat dari zina bisa disebut maslahat tetapi ia dibatalkan oleh syariah melalui nash-nash yang ada.

Demikian juga maslahat riba, minum arak dan lain sebagainya. Bagi Najamuddin al-Thufi maslahat seperti ini merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai sumber hukum (landasan hukum). Konsep ini menjadi sebuah kaidah populer yang diakui oleh ulama' dimana ada maslahat, maka disana terdapat hukum Allah. (Said, 1997)

5. Masalah Mursalah.

Maslahah mursalah adalah masalah yang tidak disebut-sebut oleh nash akan tetapi kemaslahatan itu riil dan banyak dibutuhkan dalam menjaga ketertiban hukum seperti dimasa-masa sekarang, misalnya kebijakan pengadaan lembaga pemasyarakatan atau rumah penjara bagi pelaku kejahatan, pengadaan mata uang sebagai alat tukar dalam transaksi dan lain sebagainya.

Tingkatan-tingkatan dalam Masalah.

Menurut al-Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu:

1. Maslahat Dhoruriyat.

Dharuriyat secara etimologi diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat istilah yang sering kita dengar. Apabila suatu kebutuhan dan kebutuhan itu

tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. (Djazuli, 2003).

Urusan-urusan yang *dharuriyat* itu ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, maka timulah kekacauan, dan berkembangnya kerusakan. (Umam, 2001).

2. Masalahah Hajiyyah.

Kebutuhan *hajiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana apabila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam hukum Islam terdapat *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban. Sehingga kesulitan dalam menjalankan hukum bisa diringankan dengan ketentuan yang telah dirumuskan oleh ulama[“] ushul.

Seperti yang dicontohkan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, dalam lapangan ibadah, Bahwa telah disyariahkan beberapa hukum *rukhsah* dalam artian keringanan apabila pada nyatanya mendapati sebuah kesulitan dalam melaksanakan perintah *taklif* (Wahhab, 1994). Sebagai contoh, Islam mengizinkan boleh tidak puasa apabila perjalanan seseorang menempuh jarak yang jauh dengan ketentuan harus diganti hari lain, demikian halnya seseorang yang sedang sakit juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan mengganti di hari lain. Selain dalam persoalan puasa, Seseorang juga boleh mengqasar shalat ketika dia lagi bepergian dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut yakni kebutuhan hajiyyah.

3. *Maslahah Tahsiniyah.*

Tahsiniyyat secara bahasa berarti penyempurnaan, tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Menurut Yusuf Qardawi kebutuhan *tahsiniyyat* adalah tingkat kebutuhan yang bilamana ketika tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok dan tidak juga mengalami kesulitan. (Qardawi, 2002).

Di beberapa wilayah kehidupan, terbagi dalam beberapa wilayah, baik itu *muamalah*, ibadah dan „*uqubah*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyyat* (Efendi, 2008). Di wilayah ibadah, menurut Abd. Wahhab Khallaf, memberikan contoh Sayriat Islam dalam bersuci baik dari najis atau hadas seperti tubuh atau badan maupun tempat tinggal di lingkungannya. Islam jua menganjurkan seseorang berdandan diri apabila akan bepergian ke masjid, dan menganjurkan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. (Wahhab, 1994)

Di wilayah *mu'āmalah* Islam benar-benar melarang kehidupan kikir, boros, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Sedangkan di wilayah „*uqubah* Islam mengharamkan menghilangkan nyawa kaum wanita di medan perang dan anak-anak, serta tidak dianjurkan melakukan penyiksaan terhadap mayat dalam perang atau istilah yang sering kita dengar *Muslah*.

Syarat-syarat Maslahah Mursalah.

Para ulama“ mensyaratkan tiga syarat pada *maslahah mursalah* untuk menjadikan dasar pembentukan hukum.

1. Merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, bukan sebuah kemaslahatan yang bersifat dugaan. Contohnya masalah yang bersifat dugaan adalah pencabutan

hak suami untuk mentalaq istrinya dan memberikan hak talak ditangan hakim saja dalam segala situasi maupun kondisi.

2. Merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Hukum tidak boleh disyariatkan hanya untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas mat dan kemaslahatan mereka. Namun harus dengan kemaslahatan mayoritas umat manusia.
3. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bisa bertentangan dengan nash dan ijma'.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan model studi kepustakaan atau yang sering kita dengar dengan (*library research*). Sedangkan yang dimaksud dengan kajian kepustakaan adalah sebuah teknik dalam menghimpun informasi baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, penerbitan maupun sumber-sumber lain. (Arief, 1998).

Kemudian setelah mengumpulkan data, penulis melakukan pembacaan secara kritis dan mendalam terhadap sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Hal ini dilakukan untuk data-data yang diperoleh tersebut dapat dijadikan sebagai sumber data yang ilmiah dan valid.

Karena kajian ditujukan untuk membongkar pemikiran Muhammad Syahrur, dan pemikiran Syahrur merupakan gagasan yang terkandung dalam naskah primer disebut sebagai gagasan primer, Maka peneliti menggunakan teknik analitis kritis. Tujuan penelitian analitis kritis menurut Jujun Suriasumantri adalah mengkaji gagasan primer mengenai suatu ruang lingkup permasalahan yang dipercaya oleh

gagasan sekunder yang relevan. (Jujun, 1998). Fokus penelitian analitis kritis adalah mendeskripsikan, membahas dan mengkritik gagasan primer selanjutnya “dikonfontasikan” dengan gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi berupa perbandingan, hubungan dan pengembangan model. (Jujun, 1998).

Adapun dalam metode penelitian anlitis kritis perlu melakukan beberapa tahap, langkah-langkahnya sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan gagasan primer yang menjadi objek penelitian.
2. Selanjutnya membahas gagasan primer tersebut dengan memebrikan penafsiran peneliti terhadap gagasan primer.
3. Melakukan kritik terhadap gagasan primer yang telah ditafsirkan tersebut.
4. Melakukan studi analitik yakni studi terhadap serangkaian gagasan primer dalam bentuk perbandingan, hubungan, pengembangan model rasional, dan penelitian historis.
5. Menyimpulkan hasil penelitian.

TEMUAN PENELITIAN

Biografi Muhammad Syahrur.

Nama lengkap tokoh pemikir muslim kontroversi ini adalah Muhammad Syahrur Ibnu Dayb. Ia dilahirkan di perempatan Sahiliyah, Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938 (Syarqawi, 2003). Dia dari keluarga yang sederhana, ayahnya bernama Dayb bin Daib, sedangkan ibunya bernama Shadiqah binti Shalih Falyun (Syahrur, 2000). Dalam perjalanannya, Syahrur menikah dengan Azimah dan diamanahi lima orang anak yaitu Thariq yang beristrikan rihab, kemudian al-laits yang beristrikan olga, selanjutnya Rima yang bersuamikan Luis, sedangkan masih ada

dua lagi yaitu basil, dan Mashun (Syahrur, 1996). Kemudian yang bernama Muhammad dan Kinan adalah kedua cucunya.

Konsep *Hudud* dalam terminologi *ushul fiqh*.

Hudud merupakan bentuk jamak dari *had*, yang secara bahasa memiliki dua makna dasar yaitu larangan dan batas (tepi) sesuatu (Abu Al-Husain, 1979). Jika dikaitkan dengan kata حد السيف atau حد السكين . maknanya menjadi mengasah mata pisau atau mengasah mata pedang (Abu Al-Husain, 1979). Dalam makna leksikal *had* (*hudud*) biasa dimaknai dengan ta'rif atau undang-undang (Hafifi, 1994). Dalam bahasa Indonesia kata tersebut diartikan memberi batas, membedakan, memisahkan, mencegah, menghindarkan dan menjatuhkan hukuman. (Munawir, 1997). Membuat definisi atau ta'rif berarti memberikan batasan (dari segi mani" dan jami") pengertian sebuah istilah sehingga term lain tidak masuk didalamnya, kaitanya dengan undang-undang sebab undang-undang memberikan batasan atau aturan terhadap sesuatu sehingga seseorang tidak boleh melanggarnya.

Pengertian *hudud* dalam Alquran kadang bermakna larangan seperti pada Q.S. 2, al-Baqarah : 187, yakni setelah Allah menceritakan kebolehan bercampur dengan istri pada malam hari bulan puasa dan tidak membolehkannya ketika sedang i'tikaf di masjid lalu dilanjutkan dengan تلك حدود الله فلا تقربوها . (itulah larangan Allah dan maka jangan kamu kamu mendekatinmya) . Atau kadang tampil dengan makna aturan hukum seperti yang terdapat pada Q.S. 2, al-Baqarah :229 yakni ketika Allah menerangkan tentang prosedur thalak dan konsekuensinya, kemudian dilanjutkan dengan تلك حدود الله فلا تعتدوها (itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya). Di kali yang lain *hudud* bermakna aturan yang punya batas ketentuan seperti pada Q.S. 4, al-Nisa" : 13 yakni setelah Allah menerangkan

tentang ketentuan kewarisan, lalu di tegaskan **تلك حدود الله** (itulah ketentuan Allah). Sebab batas ketentuan atau ukuran kewarisan itu telah diberikan Allah .

Adapun ayat-ayat yang memuat lafal *hudud* dan hakikat makna yang dikandungnya dalam Alquran dapat diklasifikasikan sebagai tergambar dalam tabel berikut ini:

No	Nama Surat/Ayat	Frekuensi	Hakikat Maknanya
1	Q.S al-Baqarah: 187	1 kali	Larangan-larangan
2	Q.S al-Baqarah: 229	4 kali	Hukum-hukum
3	Q.S al-Baqarah: 230	2 kali	Hukum-hukum
4	Q.S al-Nisa ^o : 13	1 kali	Ketentuan-Ketentuan.
5	Q.S al-Nisa: 14	1 kali	Ketentuan-Ketentuan
6	Q.S al-Taubah: 97	1 kali	Hukum-hukum
7	Q.S al-Taubah: 112	1 kali	Hukum-hukum
8	Q.S al-Mujadalah: 4	1 kali	Hukum-hukum
9	Q.S al-Thalaq: 1	2 kali	Hukum-hukum
	Jumlah	14 kali	

Abdullah Ahmed Naim menengarai bahwa konsep *Hudud* meski diambil dari Al-Qur^oan masih memunculkan problem definisi yang serius. Karena Al-Qur^oan merupakan teks keagamaan, maka ia hanya memberi sedikit definisi yang sah dan unsur-unsurnya yang spesifik. Al-Qur^oan telah menyebutkan *hudud* terutama untuk pezina, pencurian, dan tuduhan zina. Dalam yurisprudensi Islam, istilah untuk hukuman tersebut adalah *had*. Yang secara literal berarti batas, batasan, atau faktor yang membatasi. Hukuman itu untuk membatasi tindakan kejahatan, dan oleh karena itu disebut *hudud*.

Pemikirannya terkait teori *hudud* ini berangkat dari QS. Al-Nisa^o ayat 13-14, yang membahas persoalan pembagian waris. Adapun ayatnya sebagai berikut;

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. al-Nisa": 13-14).

Pada ayat 13, terdapat kalimat "tilka hudud Allah" dan pada ayat 14, terdapat kalimat "wa yata'adda hududahu". Kata *hudud* di sini berbentuk jamak dari bentuk mufradnya *hadd*, yang artinya batas (limit). Pemakaian bentuk plral di sini menandakan bahwa batas atas yang ditentukan oleh Allah swt berjumlah banyak, dan manusia memiliki kelaluasaan untuk memilih batasan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. (Burhanudin, 2008).

Pada ayat 14, kalimat "wa yata'adda hududahu" berarti melanggar batas-batas (hukum)-Nya. Penggunaan term *hudud* di sini dinisbatkan kepada dhamir mufrad (kata ganti tunggal) "hu" (dia) yang merujuk pada Tuhan saja. Sedangkan term *al-Istiqamah*, dan *al-Hanifiyah* berasal dari dimensi universalitas Islam. Term *al-Hanif* berasal dari kata *hanafa* yang berarti bengkok atau melengkung, *ahanafa* orang yang bengkok kakinya. (Syahrur, 1990).

Sedangkan term *al-istiqamah*, yang *mustaq* dari "*qaum*" yang memiliki dua arti : kumpulan manusia laki-laki, dan berdiri tegak (*alintisab*) dan atau kuat (*al-azm*). Dari lafal *al-intisab* ini muncul kata *al-mustaqim* dan *al-istiqamah*, yakni akronim dari melengkung (*al-inhiraff*) sedangkan dari *al'azm* muncul kata *al-din al-qayyim* (agama yang kuat). Syahrur mengatakan bahwa kata kuat ini menunjukkan pada surat al-Nisa" dan al-Baqarah ayat 255. Hal ini selanjutnya mengantarkan Syahrur pada sebuah ayat dalam surat al-An'am ayat 161,

dimana dalam surat ini, secara bersama-sama memuat *al-Istiqamah* dan *al-Hanifiyah* sekaligus. (Syahrur, 1990).

Hal ini bagi Syahrur, menimbulkan pertanyaan, sebab betapa mungkin al-islam, agar menjadi kuat dapat terakumulasi dalam dua hal yang kontradiktif. Pertanyaan itulah yang mendorong Syahrur untuk mengadakan penelitian lebih dalam.

Di sinilah, ia menerapkan analisa *paradigmatis-sintagmatisnya*. Analisa *paradigmatisnya* tampak ketika dibandingkannya *hanafa* dengan *janafa* yang artinya condong kepada kebagusan (QS. al-Baqarah:182).¹ (In'am,).

Syahrur mengumpamakan *al-Hanifiyah* sebagai bentuk kondisi sosial yang meliputi nash-nash al-Qur'an dalam perjalanan sejarahnya, sejak diturunkan pada abad VII H sampai sekarang. Sedang *al-Istiqamah* sebagai batas-batas yang telah ditetapkan Allah swt dalam nash al-Qur'an. Di samping analisa *paradigma sintagmatis* tersebut. Syahrur juga merumuskan teori-teorinya dengan analisis matematik, yaitu rumus matematika yang dikembangkan oleh Sir Issac Newton yang berhubungan dengan persamaan fungsi yang dirumuskan dengan $Y=f(x)$ dengan satu variabel. Atau $Y=f(x,y)$ dengan dua variabel.



Syahrur menggambarkan hubungan antara *al-Hanifiyah* dan *al-Istiqamah*, dengan kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks. Dimana sumbu X menggambarkan zaman, sejarah. Sedangkan sumbu Y sebagai undang-undang yang telah diteapkan oleh Allah swt (sumbu Y). Dengan demikian, hubungan antara kurva dan garis lurus secara keseluruhan bersifat dialektik, yang tetap dan yang berubah senantiasa saling berkait. Dialektika adalah

¹ M. In'am Esha, Loc. Cit, hal 306.

keharusan untuk menunjukkan bahwa hukum adaptable terhadap konteks ruang dan waktu. (Syahrur, 1990).

Dengan dua sifat ini hukum Islam akan selalu menemukan relevansinya di setiap tempat dan waktu. Yaitu memberikan ruang ijtihad yang luas selama tetap berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Pada titik ini, Syahrur berpendapat bahwa dalam *umm al-kitab*, Allah hanya memberikan batasan-batasan hukum saja. Inilah yang disebut dengan batas-batas hukum Allah (*hududallah*) yang jika dipadukan dengan pilar-pilar moral akan membentuk jalan yang lurus.

Teori hudud Syahrur inilah yang membedakan dari konsep *hudud* konvensional atau konsep *hudud* menurut para fuqaha yang telah dijelaskan di atas. Dalam teori *hudud* konvensional tidak dikenal istilah batas maksimal dan batas maksimal. Meskipun demikian, hudûd akan diberlakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang secara detail dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi secara sempurna, hukuman *hadd* tidak dapat diberlakukan. Sebagai gantinya, pelaku kejahatan akan dikenai hukuman *ta'zir* (*hukuman yang berat ringannya diputuskan berdasarkan ijtihad seorang hakim*). (Mustaqim, 2017).

Dari perbedaan istilah *hudud* tersebut, Mustaqim dalam jurnalnya yang berjudul “Teori hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam al-Qur’an” termuat dalam jurnal al-Quds, memberikan gambaran yang jelas terkait konsepsi hudud tersebut.

Perbandingan teori hudud.

Teori Hudud Konvensional (<i>Qadim</i>)	Teori hudud Syahrur (<i>Jadid</i>)
Obyek penafsirannya hanya pada ayat-ayat yang diyakini <i>qath'îyy al-dalalah</i>	Objek penafsirannya tidak hanya ayat-ayat yang <i>qath'îyy al-dalâlah</i> , tetapi juga <i>zhanniy al- dalâlah</i>
Hanya berkaitan pada masalah <i>`uqûbât</i> (ancaman hukuman).	Tidak hanya berkaitan dengan masalah <i>`uqûbât</i> (hukuman), tetapi juga berkaitan dengan masalah ketentuan hukum (<i>tasyri'iyât</i>).
Penafsirannya bersifat rigid dan fixed,	Penafsirannya bersifat elastis dan dinamis,

tidak boleh ditambah atau dikurangi, sehingga bersifat tekstual dan kurang dapat mengakomodir perkembangan zaman.	selagi masih berada dalam wilayah <i>hadd al-adnâ</i> dan <i>hadd al-a'lâ</i> , sehingga bisa bersifat kontekstual dan mampu mengakomodir perkembangan zaman.
Tanpa melibatkan analisis matematis dalam penafsiran-nya.	Penafsirannya menggunakan analisis matematik yang bingkai dengan analisis <i>linguistik</i> .

Dari sinilah kemudian Syahrur memperkenalkan teori *hududnya* (*Nazariyat al-Hudud*). Asumsi dasarnya adalah bahwa Allah swt (dalam al-qur'an atau al-Kitab dalam bahasa Syahrur), menetapkan batas-batas hukum maksimal dan minimal (*al-istiqamah*), dan manusia senantiasa bergerak dari dua batasan ini (*al-hanifiyyah*), teori tersebut memuat enam point yaitu: (Syahrur, 1990).

PEMBAHASAN

Konsep masalah dikembangkan oleh ulama²² ushul yang lain, termasuk dalam hal ini adalah Imam al – Ghazali dengan menginterpretasikan secara skala prioritas pada item-itemnya. Skala prioritas yang dimaksud diantara yang pertama adalah prioritas *Dhoruriyah* dan yang kedua prioritas *Hajiyah*, dan Ketiga adalah Prioritas *Tahshiniyyat*. Gurunya Imam al-Ghazali yang bernama Imam Hareman memberikan istilah yang berbeda, dimana dalam istilahnya beliau menyebutkan Prioritas *Dhoririyah*, Kedua Prioritas *Hajjah*, dan yang ketiga adalah *Makramah*.

Maka dari itu semangat masalah sebagai orientasi hukum haruslah ada. Mungkin prioritasnya terkadang berbeda antara satu dengan lainnya. Seperti halnya yang dilakukan, di mana ia juga berangkat dari konsep. Premis – premis dasar yang dibangun Syahrur bisa saat ia membuat teorinya yang penuh dengan premis-premis kulliyah. Dari pertanyaan mendasar dapat kita ketahui dalam buku *Prinsi-prinsip*

dasar Hermenutika al- Qur'an Kontemporer gagasan primer Syahrur, Apabila Islam bersifat relevan pada setiap ruang dan waktu.

Konsekuensi logisnya juga harus dipahami bahwa diturunkan pada kita yang hidup pada abad kedua puluh ini, seakan-akan Nabi Muhammad baru saja meninggal setelah menyampaikan wahyu al-Qur'an kepada kita, Maka dari itu pembacaan terhadap al-kitab harus dalam perspektif nalar kita yang hidup di zaman sekarang. Dari pendapatnya tersebut jelas berorientasi pada konsep masalah.

Hal lain yang mendasari kajian Syahrur adalah dimensi filsafat humaniora (Syahrur,2004). Menurut Syahrur, pemikiran Arab Kontemporer, termasuk didalamnya pemikiran Islam, memiliki masalah-masalah dasar sebagai berikut. Pertama, tidak adanya metode ilmiah obyektif. Selama ini pengkajian terhadap agama dan keagamaan selalu bersifat normatif. Kedua, adanya pro konsepsi terhadap sebuah masalah sebelum dilakukan penelitian. Sebagai contoh, apabila berbicara masalah posisi perempuan dalam Islam. Para peneliti Islam berkesimpulan terlebih dulu, dan mereka menyimpulkan bahwa perempuan sudah proposional dalam Islam dan Islam adalah agama yang paling adil terhadap perempuan. Model seperti ini dapat dinamakan sebagai pendekatan *apologetic* (*Apologetic Approach*).

Akan tetapi bagaimana melihat teori hudud Syahrur dalam konsep masalah. Di sini peneliti mencoba menganalisis teori tersebut dan menjabarkannya sebagaimana berikut;

1. Teori hudud Syahrur ketika dilihat dari kacamata konsep masalah Syatibi, yang membagi masalah untuk memelihara hal, maka sangat jelaslah teori hudud merupakan bagian dari upaya dalam menjaga aspek agama. Teori ini bisa dilihat ketika prinsip dalam pembuatan hudud haruslah tetap pada batas atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga Syahrur tidak menganjurkan

dalam pembuatan hukum tidak keluar dari hudud Allah. Dengan begitu maka kepentingan untuk menjaga agama Allah sangatlah terjamin penjagaannya.

2. Teori hudud dilihat dari konsep masalah mursalah yang telah dibangun oleh ulama“, secara tidak langsung teori Syahrur telah memenuhi syarat yang diberikan para ulama“ dalam masalah mursalah untuk menjadikan dasar pembentukan hukum, karena pertama, teori hudud merupakan berupaya mewujudkan masalah yang hakiki, bukan masalah yang keihatan semu, akan tetapi sangat jelas ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh teori hudud tersebut. Kedua, Teori hudud merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi, hal ini bisa dilihat bagaimana Syahrur membangun teorinya atas dasar penolakan fikih klasik yang dibangun di bawah pemerintahan tirani. Sehingga terwujud hukum yang berkeadilan dan berorientasi terhadap kemaslahatan ummat, tidak mewujudkan kemaslahatan kepada penguasa atau pemerintah.
3. Produk hukum dari hasil teori hudud Syahrur tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur“an, karena teori hudud Syahrur dibangun atas dasar-dasar dari nash yang diambil dalam al-Qur“an, oleh karena itu Syahrur menganjurkan agar formulasi pembentukan hukum harus kembali kepada nash al-Qur“an dan menafsirkan ulang dengan pendekatan ilmu-ilmu modern atau prestasi kelimuan muttakhir.
4. Kemudian hasil akhir produk hukum dari teori hudud tersebut sangat jelas bahwa Syahrur berharap hukum Islam lebih berorientasi terhadap hukum yang manusiawi, tidak bias gender, berkeadilan, anti tirani, toleran, dinamis, realistik, demokratis, sehingga terwujudnya Masyarakat yang madani.

SIMPULAN

Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan atau relasi antara teori hudud Muhammad Syahrur dengan konsep masalah, yang sudah menjadi pembahasan hangat oleh ulama"-ulama" ushul terkait studi pembaharuan hukum Islam. Kesimpulan penelitian peneliti jabarkan sebagaimana berikut;

1. Syahrur dalam membangun teori hududnya berawal dari kajian filologi atau bahasa sebagai pijakan awal penafsiran terhadap ayat-ayat hukum. Dari situ Syahrur menemukan bahwa banyak istilah-istilah di dalam al-Qur'an yang seharusnya ditafsirkan dengan pendekatan penidakbiasan (*demafileiarisasi*) terhadap model bacaan teks-teks al-Qur'an ulama" klasik. Dan juga dengan metode Linguistik-historis-ilmiah. Dengan begitu bisa ditemukan pemaknaan istilah-istilah kata kunci al-qur'an yang harus dipahami, yaitu *hudud*, *al-istiqlamah*, dan *al-hanafiyah*.
2. Setelah melakukan penafsiran dengan model pembacaan kontemporer, Syahrur menemukan teori hudud yang di dalamnya termuat enam teori dalam menganalisis ayat-ayat muhkamat yang terdapat pada al-Qur'an.
3. Kemudian teori hudud dilihat dari prespektif konsep masalah, dalam hal ini peneliti menggunakan konsep dari Syatibi dan Imam Ghazali, Maka dari itu teori hudud Syahrur dalam membangun teorinya berorientasikan kepada kemaslahatan.
Pertama, Teori hudud Syahrur ketika dilihat dari kacamata konsep masalah Syatibi, yang membagi masalah untuk memelihara hal, maka sangat jelaslah teori hudud merupakan bagian dari upaya dalam menjaga aspek agama. Teori ini bisa dilihat ketika prinsip dalam pembuatan hudud haruslah tetap pada batas atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga Syahrur tidak menganjurkan dalam pembuatan hukum tidak keluar dari hudud Allah. Dengan

begitu maka kepentingan untuk menjaga agama Allah sangatlah terjamin penjagaannya. **Kedua**, Teori hudud dilihat dari konsep masalah mursalah yang telah dibangun oleh ulama², secara tidak langsung teori Syahrur telah memenuhi syarat yang diberikan para ulama² dalam masalah mursalah untuk menjadikan dasar pembentukan hukum, karena pertama, teori hudud merupakan berupaya mewujudkan masalah yang hakiki, bukan masalah yang keihatan semu, akan tetapi sangat jelas ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh teori hudud tersebut. Kedua, Teori hudud merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi, hal ini bisa dilihat bagaimana Syahrur membangun teorinya atas dasar penolakan fikih klasik yang dibangun di bawah pemerintahan tirani. Sehingga terwujud hukum yang berkeadilan dan beroerientasi terhadap kemaslahatan ummat, tidak mewujudkan kemaslahatan kepada penguasa atau pemerintah. **Ketiga**, Produk hukum dari hasil teori hudud Syahrur tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an, karena teori hudud Syahrur dibangun atas dasar-dasar dari nash yang diambil dalam al-Qur'an, oleh karena itu Syahrur menganjurkan agar formulasi pembentukan hukum harus kembali kepada nash al-Qur'an dan menafsirkan ulang dengan pendekatan ilmu-ilmu modern atau prestasi kelimuan muttakhir. **Keempat**, Kemudian hasil akhir produk hukum dari teori hudud tersebut sangat jelas bahwa Syahrur berharap hukum Islam lebih berorientasi terhadap hukum yang manusiawi, tidak bias gender, berkeadilan, anti tirani, toleran, dinamis, realistis, demokratis, sehingga terwujudnya Masyarakat yang madani.

REFERENSI

- Achamad Syarqawi Ismail. (2003). *Rekonstruksi konsep wahyu Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: elSAQ Press.
- Ahmad Zaki, (2007). *Pendekatan Strukturalisme linguistic dalam tafsir al-Qur'an Kontemporer ala Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: elSAQ Press.
- Abdul Mustaqim. (2017). *Teori Hudud Muhammad Syarur dan Kontribusinya dalam Penafsiran al-Qur'an*, Jurnal Studi Qur'an dan Hadist, STAIN Curup.
- Amir Syarifudin. (1999). *Ushul Fiqih, Jilid II*, Jakarta: Logos WACANA Ilmu.
- Abdul Manan. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Djazuli, (2003). *Fiqih Siyasah*, Bandung: Prenada Media.
- Al-Thufi. (1998). *Al-Ta'yyin Fi Syarhi al-Arbain*, Beirut: Muassasah al-Rayyan.
- Abdul WAHAB Khalaf. (1994). *Ilmu Ushul Fiqih*, alih Bahasa: Moh Zuhri dan Ahmad Karib, Semarang: Ina Utama.
- Burhanudin Dzikri. (2008). *Membongkar Ideologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: elSAQ Press.
- Chaerul Umam. (2001). *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia.
- Danial. (1996). *Seven Theory of Religion*, New York: Oxford University Press.
- Dahlan Tamrin. (2010). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Malang: UIN Maliki Press.
- Fathurahman Djamil. (1997). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu..
- Husain Hamid Hasan. (1971). *Nazariyat al-Maslahah.al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar Ibnu Manzur. (1995). *Lisan al-Arab*, Beirut. *Li al-Thiba'ah wa al-Nashr*.
- In'am Esha Muhammad. (2002). *Teori Bats dalam Hukum Islam, Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur*, Jurnal Hukum Islam al-Mawarid Edisi VIII.
- KBBI Online, <https://kbbi.web.id>.
- Muhyar Fanani, (2007). *Pudarnya Pesona Ilmu Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. As'at. (2012). *Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*. Jurnal Agama dan HAM. INRIGHT.
- Muhammad Syahrur. (2000). *Dirasah al-Islamiyah Manzumat al-Qiyam*, Damaskus *al ahali li at-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi*
- Muhammad Syahrur. (1990). *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Mu'ashirah*. Damaskus: *al ahali li at-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi*.

- M. In'am Esha. (2003). *Muhammad Syahrur Teori Batas dalam Khudhori Saleh, Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela.
- Muhammad Syahrur. *Iman dan Islam, Aturan-aturan Pokok*, Terj Su'udi.
- Muhammad Syahrur. (2004). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, Terj Sahiron Samsudin, Burhanudin. Yogyakarta: elSAQ Press.
- Muhammad SYahrur. (1994). *Dirasah Islamiyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*.
- Munawar Kholil. (1995). *Kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang. *Al-Nahdah al-Arabiyah*.
- Ridwan. (2008). *Muhammad Syahrur Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Rohididn. (2014). *Relevansi Teori Batas Muhammad Syahrur Sebagai Basis Pembaharuan Hukum Kewarisan di Indonesia*. Laporan Penelitian. UII.
- Sahiron Samsudin. (2003). *Hermeneutika al-Qur'an Madzab Yogya*. Yogyakarta: Islamika.
- Sibawaihi. (2002). *Pembacaan al-Qur'an Muhammad Syahrur*. Jurnal Afkar. Jakarta: Lakpesdam NU.
- Satria Efendi. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Suharismi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahbah Zuhaili. *Ilmu Ushul Fiqh*. Juz II.
- Wahbah Zuhaili. (2013). *Ushul Fiqh, al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fiqri.
- Yusuf Qardawi. (2002). *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*. Malang. Gema Insani Pers.
- Yusdani. (2000). *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najamudin al-Thufi*, Yogyakarta: UII Press.

